

OLAHRAGA SEBAGAI SARANA POLITIK DAN KEKUASAAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Totonafu Hulu¹, Efraim Candela Sinaga², Nada Misva Sebayang³,
Sandrina Malakiano Naibaho⁴, Kismiati Lovita Hutasoit⁵,
Yan Indra Siregar⁶, Putra Arima⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIKK UNIMED

¹Totonafohulu27@gmail.com, ²efraimsinaga02@gmail.com, ³nadasebayang10@gmail.com, ⁴sandrinanaibaho06@gmail.com, ⁵kismiatihts05@gmail.com, ⁶yanindra@unimed.ac.id, ⁷putraarima@unimed.ac.id

ABSTRACT

Sport is not merely viewed as a physical activity to improve health and performance, but also plays a strategic role in social life, particularly in the fields of politics and power. This study aims to analyze the function of sport as a political and power tool in the social life of communities. The method applied is library research by analyzing various scientific sources such as journals, books, and articles related to the topic of study. Data analysis was conducted using a qualitative descriptive approach through the interpretation of various relevant literature. The research findings indicate that sport is often used as a tool for political legitimacy, a means of propaganda, and a way to create an image of power, whether by individuals, groups, or the state. On the other hand, sport also functions as an arena for social interaction that can influence the strengthening or weakening of power structures within communities. The conclusion of this study shows that sport has a strong relationship with social and political aspects, so it cannot be separated from the dynamics of power in community life.

Keywords: *politics, power, social life, society, sports*

ABSTRAK

Olahraga tidak sekadar dilihat sebagai kegiatan fisik untuk meningkatkan kesehatan dan prestasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, khususnya dalam bidang politik dan kekuasaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fungsi olahraga sebagai alat politik dan kekuasaan dalam kehidupan sosial komunitas. Metode yang diterapkan adalah penelitian pustaka dengan menganalisis beragam sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel yang terkait dengan topik studi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penginterpretasian berbagai literatur yang relevan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa olahraga sering digunakan sebagai alat legitimasi politik, sarana propaganda, dan cara untuk menciptakan citra kekuasaan, baik oleh individu, kelompok, maupun negara. Di samping itu, olahraga juga berfungsi

sebagai arena interaksi sosial yang dapat memengaruhi penguatan atau pelemahan struktur kekuasaan dalam komunitas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa olahraga memiliki hubungan yang kuat dengan aspek sosial dan politik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: kehidupan sosial, masyarakat olahraga, politik, kekuasaan

A. Pendahuluan

Olahraga sudah lama diakui sebagai elemen yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Dalam kemajuan peradaban modern, olahraga tidak hanya dianggap sebagai kegiatan fisik untuk menjaga kesehatan dan mencapai prestasi atletik, tetapi telah berevolusi menjadi fenomena sosial yang rumit dengan dimensi politik, ekonomi, dan budaya yang sangat luas. Aneka acara olahraga skala besar—from Olimpiade, Piala Dunia, Asian Games, hingga Pekan Olahraga Nasional (PON)—sering kali menjadi ajang bagi berbagai kepentingan politik yang melampaui batas lapangan pertandingan. Fakta ini menegaskan bahwa olahraga dan politik adalah dua aspek yang sukar untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial masa kini. Hubungan antara olahraga dan kekuasaan telah menjadi fokus utama bagi para ilmuwan sosial sejak pertengahan abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Antonio Gramsci, Pierre

Bourdieu, Joseph Maguire, dan Jay Coakley menyumbangkan pemikiran teoritis yang penting dalam memahami peran olahraga sebagai tempat reproduksi kekuasaan dan hegemoni budaya. Gramsci memperkenalkan ide hegemoni yang menjelaskan cara kelompok yang dominan mempertahankan kekuasaannya bukan hanya dengan paksaan, melainkan melalui persetujuan kultural yang dibentuk dalam berbagai institusi sosial, termasuk olahraga (Ottesen et al., 2022). Sementara itu, Bourdieu menganggap olahraga sebagai arena (field) di mana terjadi persaingan berbagai jenis modal sosial, ekonomi, dan simbolik yang mencerminkan serta mereproduksi struktur kelas dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia,

hubungan antara olahraga dan politik telah ada sejak zaman kemerdekaan. Selama era Presiden Soekarno, olahraga berfungsi sebagai alat perjuangan ideologi dan lambang

perlawanan terhadap imperialisme Barat, yang puncaknya tercermin dalam pelaksanaan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1963. Di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, olahraga terutama bulu tangkis digunakan sebagai sarana legitimasi rezim dan penunjukan kapasitas bangsa di arena internasional. Sampai pada masa reformasi dan pemerintahan saat ini, olahraga masih memiliki dimensi politik yang signifikan, baik dalam kebijakan pengembangan olahraga nasional maupun dalam strategi diplomasi global (Ma'mun, 2019).

Di kancah internasional, fenomena diplomasi olahraga semakin menarik perhatian sebagai bagian dari strategi soft power negara-negara di seluruh dunia. Pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang menjadi contoh konkrit bagaimana Indonesia menggunakan mega-event olahraga sebagai sarana untuk meningkatkan reputasi nasional, memperluas hubungan diplomatik, dan memperkuat posisi geopolitik di wilayah Asia (Trotier, 2021). Selanjutnya, olahraga juga berfungsi sebagai alat dalam mengatasi masalah-masalah sensitif

seperti konflik di Papua melalui pelaksanaan PON XX Papua pada tahun 2021 dan kerjasama olahraga dengan negara-negara Pasifik Selatan (Pugu, 2022). Walaupun fenomena politisasi dalam olahraga telah banyak diteliti di berbagai negara, studi yang secara khusus dan mendalam membahas fungsi olahraga sebagai alat politik dan kekuasaan dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia sangat terbatas. Sebagian besar studi yang ada cenderung menyoroti aspek teknis olahraga atau pencapaian atlet, sementara dimensi sosial-politiknya kurang mendapatkan perhatian cukup. Dengan demikian, studi ini hadir untuk menutupi kekosongan tersebut melalui analisis literatur yang terstruktur dan menyeluruh mengenai fungsi olahraga sebagai medium politik dan kekuasaan dalam masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional

Penelitian ini mengaplikasikan kerangka teori sosiologi kritis dengan menggabungkan pandangan Gramsci mengenai hegemoni, Bourdieu berkenaan dengan arena dan modal sosial, serta studi terkini tentang diplomasi olahraga dan pengaruh lembut. Melalui metode studi pustaka

(library research), penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis olahraga sebagai ruang kekuasaan dari sudut pandang teori; (2) meneliti kebijakan olahraga di Indonesia dalam konteks politik; (3) mengkaji peran event olahraga nasional sebagai wadah politik domestik; (4) meneliti sport diplomacy Indonesia sebagai alat soft power; dan (5) mengkaji hubungan olahraga dengan nasionalisme dan identitas dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam.

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis untuk pengembangan studi sosiologi olahraga di Indonesia dan menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan olahraga adil dan mencakup semua.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu yang menggabungkan perspektif teori hegemoni Gramsci, konsep lapangan dan modal Bourdieu, serta pendekatan soft power dalam satu bingkai analisis olahraga sebagai alat politik dan kekuasaan. Studi ini tidak hanya mengkaji olahraga sebagai fenomena sosial, tetapi juga menghubungkannya secara sistematis dengan praktik legitimasi

kekuasaan, kebijakan negara, dan diplomasi internasional di konteks Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena olahraga sebagai sarana politik dan kekuasaan dalam kehidupan sosial melalui penelusuran literatur ilmiah yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri dari 15 artikel ilmiah yang dipilih berdasarkan kriteria: (1) terindeks pada jurnal nasional dan internasional bereputasi, (2) terbit dalam rentang 2019–2024, serta (3) memiliki relevansi langsung dengan tema olahraga, politik, kekuasaan, dan diplomasi olahraga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan langkah-langkah: identifikasi sumber, seleksi literatur, pembacaan kritis, serta pengelompokan tema. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Analisis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama: (1) olahraga dan hegemoni kekuasaan, (2) kebijakan olahraga nasional, (3) event olahraga sebagai instrumen politik, dan (4) diplomasi olahraga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran olahraga dalam struktur sosial-politik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara konseptual, olahraga tidak bisa dipahami hanya sebagai kegiatan fisik, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang penuh dengan relasi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan politik saling berinteraksi dalam tatanan masyarakat modern.

1. Olahraga sebagai Wadah Kekuasaan:

Sudut Pandang Gramsci dan Bourdieu Olahraga tidak pernah terlepas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Sejak zaman modern, olahraga telah berubah menjadi salah satu bidang penting di mana pengaruh budaya, kelas sosial, dan kekuatan negara saling berhubungan. Pandangan teori Antonio Gramsci menyediakan kerangka paling menyeluruh untuk mengerti fenomena ini. Gramsci berpendapat bahwa

hegemoni tidak hanya merupakan penguasaan melalui kekerasan, tetapi juga melalui persetujuan budaya yang terbentuk secara historis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Ottesen et al., 2022). Olahraga, dalam perspektif Gramscian, merupakan salah satu sarana paling efisien dalam menciptakan dan memperkuat hegemoni tersebut.

Ottesen et al. (2022) menyatakan bahwa melalui olahraga, kelompok yang berkuasa mengembangkan nilai-nilai sosial, menetapkan norma-norma yang ada, dan menciptakan 'akal sehat' yang membuat kekuasaan tampak wajar dan alami di pandangan masyarakat. Dalam konteks ini, pencapaian olahraga nasional dijadikan simbol dominasi suatu bangsa, sedangkan kebijakan olahraga ditujukan untuk memperkuat legitimasi pemerintah yang berkuasa. Blake dan Kohe (2022) mendukung argumen ini dengan mengungkapkan bahwa Olimpiade modern—dari Sydney 2000 hingga Rio 2016—secara terus-menerus digunakan oleh negara-negara tuan rumah untuk melegitimasi kebijakan keamanan yang menindas, memindahkan penduduk, serta memperluas neoliberalisme demi

kepentingan olahraga global. Pierre Bourdieu memperkaya pandangan ini dengan istilah 'field' (medan) dan 'capital' (sumber daya). Bourdieu melihat bahwa bidang olahraga adalah ruang sosial di mana terjadi kompetisi untuk memperoleh berbagai jenis modal—ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Negara, perusahaan, dan elit politik secara proaktif mengumpulkan modal simbolik lewat olahraga untuk menguatkan posisi dominan mereka dalam struktur sosial yang lebih besar (Ottesen et al., 2022). Dalam konteks sosial Indonesia, hal ini terlihat jelas pada kebijakan olahraga nasional yang mengutamakan prestasi, sedangkan partisipasi olahraga masyarakat luas cenderung terabaikan.

2. Kebijakan Olahraga di Indonesia: Dari Alat Politik sampai Perkembangan Nasional

Sejarah kebijakan olahraga Indonesia terkait erat dengan dinamika politik kekuasaan yang mengitarinya. Ma'mun (2019) dalam analisisnya yang mendalam menggambarkan kepemimpinan nasional mulai dari Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, Orde Baru di bawah Soeharto, hingga Era

Reformasi secara langsung mempengaruhi arah kebijakan olahraga. Di masa Soekarno, olahraga dimanfaatkan sebagai alat ideologi dan simbol nasionalisme melawan imperialisme, paling jelas terlihat dalam pelaksanaan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1963 sebagai alternatif Olimpiade yang dianggap dikuasai oleh negara Barat. PON dan SEA Games:

Ajang Olahraga Sebagai Arena Politik Dalam Negeri Di dalam negeri, Pekan Olahraga Nasional (PON) telah lama berperan tidak hanya sebagai arena pertandingan atletik, tetapi juga sebagai platform politik yang penuh dengan kepentingan daerah dan nasional. Pelaksanaan PON XX Papua pada tahun 2021 merupakan contoh terbaru dari fenomena ini. Witarti et al. (2023) mengeksplorasi aspek pesan perdamaian yang terkandung dalam pelaksanaan PON di Papua—sebuah provinsi yang selama bertahun-tahun dilanda konflik separatis dan pelanggaran hak asasi manusia. Pelaksanaan PON di Papua tidak hanya bertujuan untuk meratakan pembangunan infrastruktur olahraga, tetapi secara jelas dijadikan alat komunikasi politik

pemerintah pusat untuk menunjukkan komitmen terhadap integrasi dan kesetaraan Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penentuan Papua sebagai penyelenggara PON XX adalah langkah politik dengan pertimbangan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar kepentingan olahraga. Guntoro et al. (2021) menyatakan bahwa acara-acara olahraga yang dihadiri Indonesia—from SEA Games hingga Olimpiade—memiliki dua aspek: di satu sisi sebagai indikator pencapaian atletik, sementara di sisi lain sebagai refleksi dari kemampuan pengelolaan negara dan legitimasi pemerintahan yang berkuasa. Setiap pencapaian atau kegagalan Indonesia di arena internasional selalu ditafsirkan dalam konteks politik dan akan berdampak pada reputasi pemimpin yang sedang menjabat.

Dalam konteks SEA Games, dinamika yang sama terjadi pada tingkat regional. Indonesia secara konsisten memanfaatkan penyelenggaraan dan pencapaian dalam SEA Games sebagai alat nation branding di kawasan Asia Tenggara. Harjo (2022) mengungkapkan bahwa identitas politik dalam olahraga Indonesia—

yang dapat dilacak sejak zaman kolonial—terus mengalami perubahan tetapi masih mempertahankan peran utamanya sebagai sarana pembentukan dan penegasan identitas kolektif. Sepak bola dan olahraga tim umumnya menjadi tempat di mana nasionalisme dirayakan, dikuatkan, sekaligus kadang dipertanyakan oleh berbagai kelompok berkepentingan.

3. Diplomasi Olahraga: Pemanfaatan Olahraga sebagai Alat Soft Power Indonesia

Di tingkat global, Indonesia secara strategis memanfaatkan olahraga sebagai sarana diplomasi dan peningkatan pengaruh (soft power). Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang merupakan momen terpenting dalam strategi diplomasi olahraga Indonesia di zaman sekarang. Trotier (2021) dalam penelitiannya yang diterbitkan oleh Cambridge University Press meneliti cara Indonesia memanfaatkan Asian Games 2018 sebagai sarana untuk meningkatkan konektivitas di Asia, memperkuat citra bangsa, serta memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai kekuatan regional yang sedang berkembang. Acara olahraga besar seperti Asian Games

berperan sebagai 'pusat' untuk aliran modal, manusia, pengetahuan, dan teknologi, serta menjadi simbol ritual penting dalam hubungan diplomatik antar negara.

Witarti dan Puspitasari (2019) menyusun konsep strategi Indonesia sebagai 'Swaggering Strategy'—pemanfaatan acara olahraga berskala besar untuk menunjukkan kapabilitas dan kemampuan negara kepada komunitas internasional. Dalam konteks Asian Games 2018, pendekatan ini terbukti berhasil dalam menciptakan citra Indonesia sebagai negara yang mampu menggelar acara berskala internasional dengan kualitas tinggi. Aspek diplomatik lainnya yang juga sangat penting adalah diplomasi olahraga Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan mengenai masalah Papua. Pugu (2022) berpendapat bahwa olahraga berfungsi sebagai sarana diplomasi publik yang efisien untuk mengurangi pandangan negatif tentang Indonesia terkait isu Papua merdeka, dengan memperkuat hubungan antarbangsa yang melintas batas perbedaan politik.

Akhmetkarimov dan Aminova (2021) mengontekstualisasikan fenomena ini dalam konteks global, dengan menegaskan bahwa

diplomasi olahraga—yang akarnya dapat dilacak hingga Olympia di Yunani Kuno—telah berubah menjadi alat kebijakan luar negeri yang semakin strategis di abad ke-21. Hampir seluruh negara, baik yang maju maupun yang berkembang, memanfaatkan olahraga sebagai sarana untuk membangun reputasi, memperluas hubungan diplomatik, dan menunjukkan kekuatan lunak di arena internasional. Indonesia, dengan posisi demografis dan geopolitik yang strategis, memiliki potensi besar untuk memaksimalkan diplomasi olahraga sebagai pelengkap kebijakan luar negeri yang lebih komprehensif.

4. Nasionalisme, Identitas, dan Olahraga dalam Konteks Plural Indonesia

Olahraga memiliki kemampuan istimewa untuk menciptakan dan menguatkan rasa nasionalisme dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Ngadimin (2024) dalam studinya mengenai representasi nasionalisme dalam sepak bola Indonesia menyatakan bahwa simbol-simbol nasional—seperti bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan—yang ada dalam pertandingan sepak bola berperan

sebagai penghubung identitas kolektif yang melintasi batas-batas etnis, agama, dan daerah. Sepak bola di Indonesia telah menjadi 'agama rakyat' yang menyatukan jutaan orang dari berbagai daerah di Nusantara dalam satu identitas sebagai bangsa Indonesia.

Namun, aspek olahraga dalam kehidupan sosial Indonesia juga memiliki dimensi yang kontradiktif yang perlu dianalisis dengan kritis. Harjo (2022) menunjukkan bahwa sepak bola di era kolonial berfungsi sebagai arena stratifikasi sosial yang mencerminkan dan mereproduksi hierarki ras serta kelas yang ada. Setelah kemerdekaan, sepak bola berfungsi sebagai sarana nasionalisme, namun sering pula menjadi ajang konflik yang berakar pada identitas regional dan kelompok pendukung yang berakhir dengan kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa olahraga bukanlah arena yang netral selalu terdapat hubungan kekuasaan yang rumit yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktor sosial politik untuk kepentingan yang berselisih.

Rahadian dan Ma'mun (2021) dalam penelitian mereka mengenai kebijakan pengembangan olahraga

elit di Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh dan berdasarkan riset dalam merancang kebijakan olahraga. Saat olahraga hanya dijadikan alat politik dan simbol prestise nasional tanpa mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat, akses yang adil, dan pemberdayaan komunitas, olahraga dapat memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada. Grix dan Brannagan (2024) mengingatkan bahwa di era saat ini, 'sportswashing'—pemanfaatan olahraga untuk menyembunyikan catatan buruk hak asasi manusia atau masalah pemerintahan menjadi praktik yang semakin sering dilakukan oleh negara yang ingin memperbaiki citra internasional mereka tanpa melakukan perubahan yang berarti.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa olahraga memiliki fungsi yang multifaset, tidak hanya terbatas pada kesehatan dan prestasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat sosial-politik dalam tatanan masyarakat modern. Olahraga terbukti sebagai sarana reproduksi hegemoni dalam pandangan Gramsci, sekaligus menjadi tempat persaingan modal

sosial, budaya, dan simbolik menurut Bourdieu. Di tingkat negara, olahraga berfungsi sebagai alat legitimasi politik melalui kebijakan dan pelaksanaan acara olahraga nasional. Di tingkat global, olahraga telah menjadi sarana soft power yang dimanfaatkan untuk menciptakan citra dan pengaruh di kancah internasional.

Dengan demikian, olahraga adalah elemen penting dalam sistem kekuasaan yang beroperasi dengan halus namun ampuh dalam membentuk kesadaran sosial komunitas. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan olahraga yang lebih kritis, inklusif, dan berfokus pada kepentingan publik agar tidak sekadar sebagai alat pencitraan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmetkarimov, B., & Aminova, M. (2021). *Sport as a tool of soft power in modern international relations*. *Journal of Human Sport & Exercise*, 16(2proc), S421–S426.
<https://doi.org/10.14198/jhse.2021.16.Proc2.27>
- Amali, Z. (2022). *Kebijakan olahraga nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045*. *Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI)*, 2(1), 63–83.
- Blake, A., & Kohe, G. Z. (2022). *Hosting and human rights: The Summer Olympics in the twenty-first century*. *Frontiers in Sociology*.
- Grix, J., & Brannagan, P. M. (2024). *Sports mega-events as foreign policy: Sport diplomacy, “soft power,” and “sportswashing”*. *Sport in Society*.
<https://doi.org/10.1177/00027642241262042>
- Guntoro, T. S., et al. (2021). *Bagaimana prestasi Indonesia pada SEA Games, Asian Games, serta Olimpiade? Refleksi peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38*. *Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI)*.
- Harjo, I. W. W. (2022). *The identity politics in Indonesian football during the colonial period*. *Journal Sport Area*.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. (2023). *Laporan Nasional Sport Development Index 2022: Olahraga, Daya Saing, dan Kebijakan Berbasis Data*. Kemenpora.
- Ma'mun, A. (2019). *Governmental roles in Indonesian sport policy: From past to present*. *The International Journal of the History of Sport*, 36(4–5), 388–406.
<https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1618837>
- Ngadimin. (2024). *Representasi nasionalisme dalam sepakbola di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.
- Ottesen, L., Agergaard, S., & Kjær, J. B. (2022). *Sport, dominance, hegemonic culture, and rebellion: An introduction*. *Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics*, 25(6).

- <https://doi.org/10.1080/17430437.2022.2063579>
- Pugu, M. R. (2022). *Sport diplomacy sebagai salah satu alat diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara Pasifik Selatan*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16009–16025.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.10054>
- Rahadian, A., & Ma'mun, A. (2021). *Sport policy Indonesia: Elite sport development*. *ASEAN Journal of Sport for Development and Peace*.
- Ramadhan, M. G., Ma'mun, A., & Mahendra, A. (2020). *Implementasi kebijakan olahraga pendidikan sebagai upaya pembangunan melalui olahraga berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*. *Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan*, 5(1), 69–80.
<https://doi.org/10.17509/jtikor.v5i1.23824>
- Trotier, F. (2021). *Indonesia's position in Asia: Increasing soft power and connectivity through the 2018 Asian Games*. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(1), 81–97.
<https://doi.org/10.1017/trn.2020.12>
- Witarti, D., et al. (2023). *Pesan perdamaian Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(1).
<https://doi.org/10.31315/jik.v21i1.7005>
- Witarti, D., & Puspitasari, A. (2019). *The implementation of Indonesian soft power through swaggering strategies in Asian Games 2018*. *Proceedings of ICoSEEH 2019*, 187–194.
<https://doi.org/10.5220/0009104201870194>